

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Perlindungan Hukum	17
2. Teori Pembuatan Akta.....	19
3. Teori Perbuatan Hukum	21
4. Teori Kepastian Hukum	23
G. Metode Penelitian.....	25
1. Pendekatan Penelitian	25
2. Spesifikasi Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	27
5. Metode Analisa Data.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, AKTA DAN AKTA AUTENTIK, PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT), PEMEKARAN WILAYAH,	

PEMEKARAN KONAWE SELATAN DARI KABUPATEN KONAWE DAN INTERPRETASI (PENAFSIRAN) HUKUM TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	32
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	32
1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	35
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	39
1. Pengertian Akta	39
2. Pembagian Akta-Akta	41
3. Akta Autentik	41
4. Akta Dibawah Tangan.....	46
5. Akta Pengakuan Sepihak.....	48
6. Fungsi Akta	49
7. Syarat–Syarat Sahnya Akta.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	59
1. Penegertian dan Dasar Hukum PPAT	59
2. Pembagian PPAT	63
3. Tugas PPAT	66
4. Wewenang PPAT	68
5. Kewajiban PPAT.....	70
D. Tinjauan Umum Tentang Pemekaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Dari Kabupaten Konawe.....	75
1. Sejarah Pemekaran Daerah.....	75
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemekaran Wilayah	80
3. Tujuan Pemekaran Daerah	82
4. Pemekaran Kabupaten Konawe Selatan dari Kabupaten Konawe.....	82
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS AKTA PPAT SETELAH PEMEKARAN WILAYAH KABUPATEN KONAWE DAN KABUPATEN KONAWE SELATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH	

NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	99
A. Perlindungan Hukum Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah	99
B. Hambatan dan Solusi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Akta PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah	110
C. Hambatan-Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Akta PPAT Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	113
1. Masalah dari Pihak Organisasi PPAT dalam hal ini IPPAT	113
2. Masalah dari pihak Kementrian BPN dalam hal ini Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.	116
3. Masalah dari pihak individu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)	119
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	124